

EDITORIAL

Dimensi Lain dari *Human Security*

Bencana banjir *Bohorok*, di Sumatera Utara baru-baru ini, menyebabkan ratusan orang tewas. Sungguh ironis, ini terjadi karena kebodohan kita tidak mencegah kerusakan lingkungan.

Kekerasan adalah segala tindakan atau keadaan yang menyebabkan atau menghambat realisasi potensi manusia di bawah kemampuan aktualisasinya.

Mati karena banjir termasuk kategori kekerasan yang dibuat manusia. Hidup di sekitar lingkungan bahaya seperti di reaktor nuklir yang siap meledak setiap saat, adalah hidup penuh resiko. Dan, atas nama pembangunan ekonomi orang juga merusak lingkungan. Kekerasan pembangunan terjadi.

Bencana *Bohorok* menuntut kita untuk merefleksi atas salah satu dimensi keamanan manusia, yakni, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan, sama buruknya dengan konflik kekerasan akibat buruknya sistem politik. Korban tewas yang terjadi sama-sama sia-sia, karena kebodohan kita tidak mencegahnya.

Membiarkan orang mati karena kebodohan adalah kekerasan ganda. Jika kekerasan seperti itu terus berulang dan tanpa upaya pencegahan, apakah kita ingin bunuh diri secara sistematis dan perlahan-lahan? ■

INSIDE

- PELA: Basarung Sumangat 2
- Reconciliation in Southeast Asia .3-4
- Conflict Mapping in Indonesia . 5-6
- SEACSN Indonesia 7
- Exchange Program Info 8-9
- SEACSN Activity 10-11
- Networks 12-13
- Experiences 14-15
- CSPS Column 16-17
- Corner 18-19
- Events 20

Another Dimension of Human Security



Bohorok flood disaster, in North Sumatra, recently has claimed hundreds people died. This was indeed irony as it happened just because of our stupidity. This disaster might be avoided, but we did nothing to prevent it. If forest was not destroyed, flood would not so massively happen and result in human tragedy.

Violence means any conditions or actions that cause or block realization of human potential since it is below its realization.

Death because of the flood that actually can be prevented, is categorized as human violence. Living under environmental degradation is full of risk and insecurity. It is like living near by volcano or nuclear reactor. Forest destruction creates human insecurity. In the name of development people destroy forest. So, the development creates a disaster, or it is called the developmental violence.

Bohorok disaster pushed us to reflect one dimension of human security that is environmental degradation. *Bohorok* flood occurred because of bad environmental system destroyed by human wrong doings. This is similar to any violent social conflicts that occur because of a bad political system. Both social conflict and environmental degradation are the same risky *habitus*. Price for human death is no different, either caused by social conflict or environmental disaster. People die with no meaningful life ending, because human stupidity does not prevent to happen.

Letting people die because of our stupidity is multiple violence. If the violence reoccur without any preventions, will we commit suicide systematically and slowly? ■

visit us at: <http://seacsn.cspis-ugm.or.id>

Basaru Sumangat

Konflik etnis yang meluas di Kalimantan Barat pada sisi kultural merupakan imbas dari tidak diberlakukannya sistem pencegahan konflik tradisional. Konflik yang melibatkan etnis Masyarakat Kalimantan Barat mempunyai sistem pencegahan konflik tradisional yang disebut *basaru sumangat*. *Basaru sumangat* adalah cara menyelesaikan konflik melalui hukuman terhadap personal atau disebut denda adat, agar konflik tidak meluas.

Masyarakat Adat Dayak (MAD), memberlakukan hukum adat dalam setiap persoalan yang terjadi di wilayah mereka apalagi bila *talino* (manusia Dayak) yang menjadi korbannya. Pihak pelaku (siapa saja, Dayak sekalipun) harus menanggung denda adatnya. Hukum adat diberlakukan untuk menghormati asas-asas kehidupan manusia yang diyakini terdiri dari: *Nyawa*, *Pama* (berkat yang menguntungkan) dan *Jiwa* yang biasa dikenal dengan *sumangat*. Dengan menghormati hukum adat maka malapetaka yang akan terjadi karena rusaknya hubungan baik, ternodanya tanah air oleh darah *talino* atau terancamnya kehidupan *talino* karena kesengajaan akan terusir dengan perangkat adat. Hukuman adat yang dikenakan jika ada sampai keluar darah adalah *basaru sumangat* (memanggil semangat).

Dalam konflik 1997 konflik tidak akan melebar jika saja pihak pelaku dengan rela menyerahkan diri dan mau menghormati hukuman adat *basaru sumangat* yang seharusnya menjadi konsekuensi perbuatan individualnya. Pantang bagi orang Dayak menaruh dendam terhadap persoalan yang sudah diselesaikan secara adat. Bisa-bisa orang Dayak itu sendiri yang akan dikenakan hukum adat apabila masih memperpanjang pertikaian yang telah selesai secara adat. Sayangnya adat sebagai sistem penyelesaian dan pencegahan konflik yang lebih besar seperti *basaru sumangat* tidak semakin diperkuat oleh negara Perdamaian, meskipun biasanya diambil masyarakat dari kedua kelompok yang bertikai selalu dilibati oleh pemda dan militer daerah. Penyelesaian yang diambil Pemda atau militer daerah, mengumpulkan tokoh-tokoh dari masing-masing kelompok, membuat ikrar perjanjian untuk berdamai dan membuat monumen sebagai kenang-kenangan. Sayangnya tokoh-tokoh yang dilibatkan tidak mengakar di masyarakat, tidak memahami system lokal. Hingga selalu dan selalu pertikaian individual dengan mudah menjadi pertikaian kolektif. ■ (Novri, Sumber: Lokakarya Nasional II SEACSN Indonesia)



Basaru Sumangat

Ethnic conflict spreading in West Kalimantan at cultural side represents the impact of unapplied traditional conflict prevention system. A conflict involving ethnic society of West Kalimantan has the traditional conflict prevention system so-called *Basaru Sumangat*. *Basaru Sumangat* is the way of finishing conflict through penalization to personal or referred as a customary fine, so that conflict does not spread.

Traditional Dayaknese Society (MAD), enforce the customary law in every problem that happens in their region and surely when *talino* (Dayaknese people) become victims. A Perpetrator party (whosoever, even if Dayaknese) has to guarantee the customary fine. A customary law is applied to respect the ground of human life believed that it consists of the: Soul, Pama (beneficial blessing) and Soul known as *sumangat*. By respecting to the law, a calamity that happens because of destroying good relation, stain of fatherland by *talino*'s blood or threatened life of *talino* because of an intention will be dissipated with a set of the customary equipment. The Customary law imposing the secretory blood is *basaru sumangat* (calling the spirit).

In conflict of 1997, the conflict would not be wide if the perpetrator party ungrudgingly surrendered and respected the penalization of custom of *basaru sumangat* which should become the individual deed consequence. It is a prohibition for Dayaknese to put the grudge to a problem that is finished traditionally. Dayaknese themselves can be imposed by the customary law if they still lengthen the conflict which have finished traditionally. Unfortunately the custom as the system of conflict solution and prevention of a larger one like *basaru sumangat* is not progressively strengthened by peace state, though it usually involves the both conflicting parties and always gets entangled by local government and military. Solution taken by local government or area military contains collecting figure from each group, making agreement pledge to make peace, and building monument. Regrettably figures that are entangled do not grow on society and comprehend the local system. So, individual conflict simply always and always becomes a collective conflict. ■ (Novri, Source: National Workshop II SEACSN Indonesia)

FOKUS SEACSN

Rekonsiliasi di Asia Tenggara: Sejumlah Pelajaran

“Perdamaian adalah kekuatan, dan kekuatan perdamaian seharusnya tidak disangsikan.”

Demikianlah salah satu butir pelajaran yang dipetik dari the 7th SEACSN Regional Workshop bertopik “*Issue based reconciliation in Southeast Asia*” yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, 25-27 Agustus 2003. Kesimpulan lain dari sejumlah diskusi, dan sekaligus pelajaran, adalah bahwa ikhtiar rekonsiliasi memerlukan daya tahan, kesabaran dan keteguhan untuk menyembuhkan luka-luka dan mencapai perdamaian yang berumur panjang. Dan lantaran tidak ada rumus ajaib untuk rekonsiliasi, kepercayaan dan kesungguhan merupakan kunci, dan pihak yang bertikai perlu berkompromi demi kebaikan masa depan.

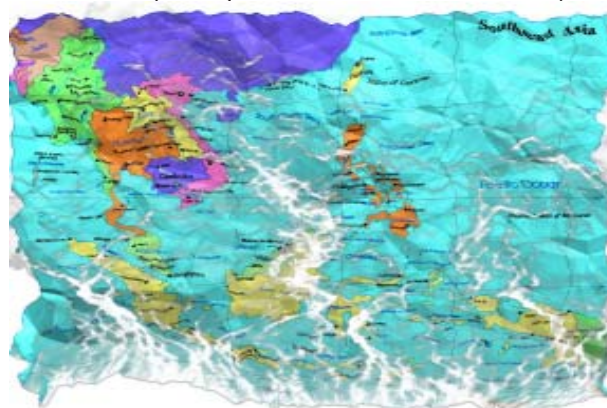
Dalam kegiatan yang disokong oleh SIDA-Swedida itu, hadir 30 peserta dan 12 *observer* dari negara-negara di Asean plus Timor-timur Lorosae. Berangkat dari pandangan teoritis bahwa rekonsiliasi merupakan sebetulnya pendekatan proaktif dalam transformasi dan pencegahan konflik, seperti diungkapkan oleh Dr. Hizkias Assefa, *workshop* ini mendiskusikan berbagai isu seperti: hak asasi manusia, keadilan, dan rekonsiliasi (kasus Afrika Selatan dan Timor Lorosae); rekonsiliasi komunitas (kasus Filipina dan Kamboja); senjata, keamanan, dan metoda penyelesaian pertikaian; pencegahan kekerasan berdasar gender; dan metoda-metoda rekonsiliasi.

Menyangkut mekanisme rekonsiliasi, sekurangnya ada dua pendekatan utama: metoda-metoda tradisional/*indigenous* dan non-tradisional atau modern. Sejumlah diskusi mengangkat pentingnya metoda-metoda rekonsiliasi berbasis tradisi atau pengetahuan lokal, yang biasanya bercorak informal namun berakar panjang dalam norma dan otoritas-otoritas keagamaan, kebudayaan, dan kesukuan. Sementara itu, metoda-metoda non-tradisional atau modern galibnya bercorak formal, melibatkan baik aktor-aktor negara maupun non-negara. Kisah sukses metoda-metoda tradisional atau *indigenous* misalnya ditemukan dari pengalaman-pengalaman di Timor Lorosae dan Filipina.

Di Timor Lorosae, salah satu cara untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah dengan menggelar upacara ritual tradisional yaitu dengan menyembelih hewan korban mereka akan

merasa terlepas secara kultural dari beban balas dendam. Sementara di Filipina, sebuah perjanjian damai baru di Mindanao dilakukan secara simbolik dengan menanam bambu bertajuk “bambu untuk perdamaian” atau “*kawayan alang sa kalinaw*”. Menanam bambu bagi orang Moro, secara kultural, digunakan untuk melambangkan permusuhan tanpa akhir. Namun melalui sebuah program pembangunan perdamaian diciptakan perspektif baru untuk melihat bambu sebagai simbol perdamaian alih-alih simbol perang dan perseteruan. Dengan demikian, menanam bambu dimaknai sebagai bekerja untuk perdamaian yang langgeng, lestari dan adil bagi semua pihak. Bambu, dengan demikian, kini menjadi simbol bagi hasrat abadi untuk perdamaian di Mindanao.

Workshop ini juga telah merangsang munculnya ide baru usulan “kegiatan perdamaian regional”. Rangkaian pertikaian yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara telah membawa beraneka pengalaman resolusi konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik serta rekonsiliasi. Kendati mengandung keping dan sumber penyelesaian konflik yang beragam, pengalaman-pengalaman ini dapat menjadi pelajaran menuju perdamaian dan harmoni bagi negara-negara lain. Sebuah catatan “kisah perjalanan menuju perdamaian” dapat menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang di luar Asia Tenggara. Lebih jauh, hal itu bahkan mungkin merangsang lahirnya gagasan *tentative* baru ihwal: ‘cara’ penyelesaian konflik *ala* Asia Tenggara. Adakah? ■ (M. Najib Azca - Peneliti, PSKP-UGM)



Editorial Board: Lambang Trijono (*Chief*), M. Najib Azca, Tri Susdinarjanti, Samsurizal Panggabean ■ **Executive Editor:** Moch. Faried Cahyono ■ **Vice Executive Editor:** Novri Susan ■ **Editorial Members:** Diah Kusumaningrum, Doddy Wibowo, Kristina Sintia Dewi, Ni Komang Widiani, Nurul Aini, Tetty Naiborhu ■ **Treasurer:** Liza Laela Mardiana ■ **Language Editor:** Ulyati Retno Sari ■ **Layout/Artistic:** Arif Surachman, Syarafuddin ■ **Address:** Editorial Board, PELA Newsletter, Sekip K-9, Yogyakarta 55281. Phone/Fax.: 0274-520733 Email: seacsn@jmn.net.id.

Reconciliation in Southeast Asia: Some Lessons to Learn

"Peace is power, and the power of peace should not be underestimated."

That is one of the lessons to learn from the 7th Southeast Asian Conflict Studies Network (SEACSN) Regional Workshop entitled "Issue based reconciliation in Southeast Asia" held in Phnom Penh, Cambodia, on 25-27 August 2003. Another conclusion drawn from the discussions, and lesson to learn, is that reconciliation processes take great resilience, patience and persistence to heal wounds and achieve long-term peace. And since there are no magic formulas of reconciliation, confidence and trust are vital and the conflicting groups need to compromise for a better future.

The workshop, supported by SIDA-Sweden, participated by 30 active participants and 12 observers from countries in Southeast Asia plus East Timor *Lorosae*. Departing from a theoretical view that reconciliation is a kind of proactive approaches of violent conflict prevention and transformation, as argued by Dr. Hizkias Assefa, the workshop discussed various issues such as human rights, justice, and reconciliation (the cases of South Africa and East Timor); community reconciliation (the cases of Cambodia and East Timor); people peace making and community peace building (the cases of Philippine and Cambodia); weapons, security, and dispute settlement methods; gender based violence prevention and community reconciliation; and methods of reconciliation.

Regarding with the mechanisms of reconciliation, there are two main approaches: traditional/indigenous methods and non-traditional or modern one. Some discussions raised the importance of traditional methods of reconciliation, those characterized by informal feature but rooted in long established religious, cultural and tribal authorities and norms.

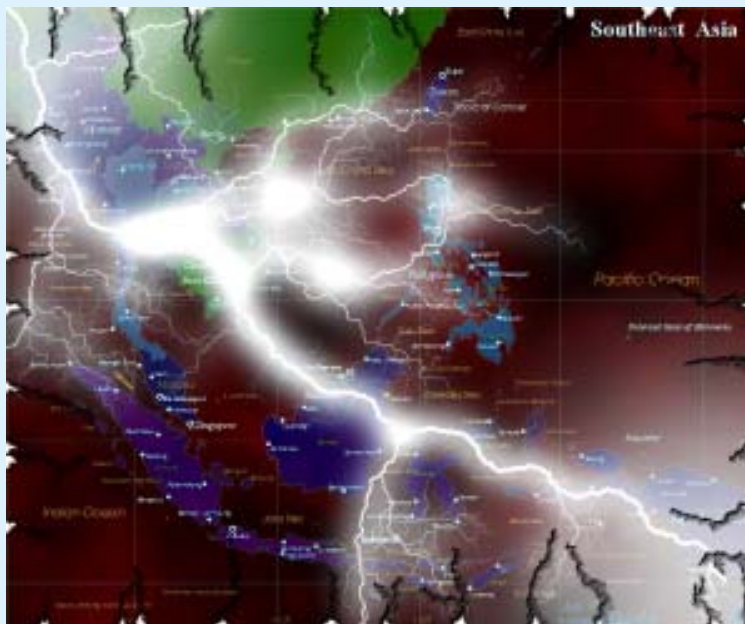
On the other hand, the non-tra-

ditional or modern methods are usually formally undertaken, involving state and non-state actors. The success stories of traditional or indigenous methods, for example, were found in East Timor *Lorosae* and Philippines experiences.

In East Timor *Lorosae*, an indigenous way to reconcile between conflicting groups is by holding a traditional ritual of slaughtering the livestock. After that, relatives of dead people would feel relieve and do not want to revenge. In Philippines, a new peace pact in Mindanao was established with a symbolic planting of bamboo tagged as "*kawayan alang sa kalinaw*" or "bamboo for peace". Planting bamboo, culturally, was used by the Moro to express ceaseless vengeance to each other. But the peace building program has developed a new perspective to see the bamboo as the symbol of peace instead of war and conflict. Thus, planting bamboo would mean working for a just, sustainable and lasting peace for all the people in the communities. Bamboo is now a symbol of undying quest for peace in Mindanao.

The workshop also provoked a new idea of "regional peace project" proposal. The repertoires of conflict have taken place in South East Asian countries brought various experiences of conflict resolution, conflict settlement, conflict management, and reconciliation. Despite the different sources

and fragment of settlements, these experiences could become learning journeys for peace and harmony for others. A registry of these "learning journeys" could be benefit for others to take. It, therefore, may stimulate a new tentative notion of South East Asian 'way' to deal with conflicts. Is there? ■ (M. Najib Azca-Researcher, CSPS-UGM)



SEACSN-Indonesia

Conflict Mapping Research Project - Indonesia

"Conflict Mapping di Indonesia: Demokrasi dan Perdamaian"

Seminar Nasional di Jogjakarta, 12 - 13 Agustus 2003

SEACSN Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional pada tanggal 12 - 13 Agustus 2003 di Hotel Jayakarta, Jogjakarta. Delapan peneliti yang menyampaikan hasil riset "*Conflict Mapping di Indonesia*" adalah :

1. Otto Syamsuddin Ishak – IMPARSIAL, Jakarta, riset tentang Konflik Separatis di Aceh.
2. Himar Farid – TRK, Jakarta, riset atas IDP,
3. Syarif Ibrahim Al-Qadri – Pasca Sarjana IIS Untan, Pontianak, riset tentang Konflik Etnis di Kalimantan Barat,
4. Latifah Anum Siregar – ALDP Papua, riset tentang Konflik Separatis di Papua,
5. Jacky Manuputty – GPM Crisis Centre, Ambon, riset atas Konflik Agama di Maluku,
6. Zuly Qodir/Novri Susan – CSPS UGM, riset tentang Fundamentalisme,
7. Suharko – Fisipol UGM, riset dengan tema Konflik antar Negara dan Masyarakat Sipil,
8. Purwo Santoso/Tri Susdinarjanti – Fisipol UGM/CSPS UGM, tema riset Konflik dalam Kebijakan Publik

Dalam seminar ini hadir peserta dari kalangan akademisi, ornop, serta praktisi yang bekerja dalam upaya menggalang perdamaian. Secara khusus pula datang mereka yang terkait dengan 8 (delapan) isu yang menjadi tema riset para peneliti. Seminar yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini dibagi dalam 8 (delapan) panel forum. Masing - masing panel menyajikan 1 topik presentasi dari peneliti dan pembahasan dari seorang ahli dalam isu yang disajikan. Diskusi dalam panel forum kemudian diperdalam dalam diskusi sesi kelompok.

Yang menarik banyak perhatian peserta adalah panel yang menyajikan topik Fundamentalisme. Pembahasan menjadi sangat menarik manakala isu Fundamentalisme dikaitkan dengan isu terorisme, serta perlawanan terhadap kekuasaan negara yang merujuk pada studi kasus atas aktivitas Majelis Mujahidin dan Hizbut Tahrir. Secara umum, semua panel diskusi pembahasan atas isu yang ditampilkan memunculkan temuan - temuan baru, yang memperkaya serta mempertajam *paper* dari para peneliti.

Eksplorasi selama 2 (dua) hari tersebut telah menjadi media bagi bertemunya praktisi, akademisi serta aktivis ornop untuk saling berbagi pengalaman. Ide serta teknik - teknik diupayakan dalam upaya - upaya penyelesaian konflik serta membangun perdamaian. Sebagai bagian dari strategi memperluas jaringan SEACSN Indonesia, koordinator CMRP Indonesia memfasilitasi diskusi antar partisipan dengan membentuk milis seacsn-indo@yahoogroups.com.

Di dalamnya termasuk aktivitas berbagi ide serta informasi atas temuan - temuan riset, menciptakan wacana publik untuk mendorong upaya - upaya penyelesaian konflik, advokasi damai, dan lain sebagainya. Upaya ini membutuhkan *support* dari semua anggota untuk menjaga agar ide - ide yang terbangun terus bergerak maju.

Adapun dalam konteks isu konflik, rencana aksi yang muncul terkait dengan derajat konflik yang berbeda - beda antara satu isu dengan isu lainnya. Dalam isu tentang IDP (Pengungsi), wacana yang akan dikembangkan paska pemetaan konflik adalah tema rekonstruksi paska konflik. Soal isu separatisme, terutama terkait dengan konflik separatis yang terjadi di Aceh. Pembahasan tentang konflik agama di Maluku juga akan berlanjut dengan tema rekonstruksi paska konflik. Deklarasi Malino menjadi titik awal masuknya upaya penyelesaian konflik yang berbasis masyarakat ke dalam wacana publik, sekaligus menjadi titik pembuka dimulainya kerja - kerja rekonstruksi sosial di Maluku. Konflik etnis di Kalimantan Barat juga membutuhkan upaya transformasi, sehingga tema rekonstruksi paska konflik akan menjadi tema yang paling tepat untuk isu tersebut di waktu yang akan datang.

Upaya penyelesaian konflik masih menjadi fokus bagi isu - isu yang terkait dengan tema Konflik antara Negara dan Masyarakat Sipil, Konflik Separatis di Papua, Konflik Kebijakan Publik, serta Fundamentalisme Agama. Kelanjutan dari semua kerja ini akan diawali oleh para peneliti yang bekerja di 8 (delapan) isu area, untuk selanjutnya akan dikembangkan oleh para peneliti tersebut dalam *cluster - cluster* yang akan dibentuk, sesuai dengan tema yang menjadi fokus kerja tim *Conflict Mapping Research Project* (CMRP) Indonesia. ■ (Didin-SEACSN Indonesia)



Conflict Mapping Research Project

“Conflict Mapping in Indonesia : Peace and Democracy”

National Seminar at Jogjakarta, August 12 - 13, 2003

As a forum to present the result of Conflict Mapping Research Project, a seminar was held on August 12 - 13, 2003 at Jayakarta Hotel, Jogjakarta. In the seminar 8 researchers presented their papers were

1. Otto Syamsuddin Ishak – IMPARSIAL, Jakarta,
2. Himar Farid – TRK, Jakarta,
3. Syarif Ibrahim Al-Qadri – Pasca Sarjana IIS Untan, Pontianak,
4. Latifah Anum Siregar – ALDP Papua,
5. Jacky Manuputty – GPM Crisis Centre, Ambon,
6. Zuly Oodir/Novri Susan – CSPA UGM,
7. Suharko – Fisipol UGM,
8. Purwo Santoso/Tri Susdinarjanti – Fisipol UGM/ CSPA UGM

Eight (8) papers of all the topics of Conflict and Peace Mapping Research in Indonesia had been discussed during the seminar: (1) Separatism in Aceh; (2) Separatism in Papua; (3) Ethnic and Religious Conflicts in Maluku; (4) Ethnic Conflict in Kalimantan; (5) Fundamentalism and Terrorism; (6) Conflict over Humanitarian and Refugees issues; (7) Public Policy Conflict; (8) State and Civil Society Conflicts. To get the best inputs from many perspectives, the seminar invited participants from academia and NGOs in Indonesia region who worked at those eight (8) issues areas. The two-day seminar was divided into 8 panel forums, each contained 1 paper presented briefly by the researcher along with presentation by the expert on related issue as discussant. There were two group discussions to explore the issues for each day. It was such a remarkable response from the participants on topics related with separatism and religious fundamentalism



at the day one, and mutual discussion at the day two. The Seminar became the melting pot for the academia and NGO's activist, to share their experiences and ideas related to the 8 (eight) issues. Mapping conflict therefore become a way for everyday life, as participants from various background had the specific idea to deal with.

As a strategy to broaden the network of SEACSN Indonesia, a mailing list was built after the seminar, especially to keep in touch with the participants at seacsn-indo@yahoo.com. Broadening the network consists of sharing idea and research findings, creating public discourse on conflict resolution, peace advocacy, and so on. In terms of building network, this effort need support from all members in order to keep the idea moving forward. In terms of the issue areas, there will be various action plans according to the various stages of conflict. On IDP's issue, conflict mapping will be continued with post conflict reconstruction theme, like the separatism issue, especially on Aceh's conflict. Religious conflict in Maluku also needs that kind of theme to deal with. Related to those issues on Maluku, since Malino Declaration something what we call "Community Based Conflict Resolution" will be running on public discourse. This could be a starting point to focus the activities on social reconstruction. Ethnic conflict in West Kalimantan needs to be transformed, so the post conflict reconstruction will be the most appropriate theme for those issues. Conflict resolution still becomes the focus area for issue on Democracy and Civil Society, Separatism in Papua, Religious Fundamentalism, Public Policy Conflict. All of these for the first instance will be done by 8 (eight) researchers, and continued by network conducted by the researchers in each issue area. ■ (Didin-SEACSN Indonesia)

Dimensi Baru Konflik Papua

Konflik separasi di Propinsi Irian Jaya atau Papua Barat kini memasuki babak baru dengan isu pemekaran Papua menjadi 3 propinsi. Konflik Papua berakar dari pensikapan yang beda atas hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969. Pemerintah pusat di Jakarta menganggap final hasil PEPERA yang disponsori PBB itu. Sementara warga setempat khususnya kelompok garis keras OPM menganggap kemenangan Indonesia dalam PEPERA 1969 adalah hasil rekayasa pihak militernya dengan mengabaikan keinginan sebenarnya rakyat Papua.

Sejak PEPERA, selama bertahun-tahun konflik terjadi antara dua kelompok garis keras, yaitu TNI yang ingin menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan OPM yang menginginkan separasi. Akibat konflik antar TNI dan OPM itu rakyat kebanyakan menjadi korban dua pihak. Kekerasan berupa terror, penculikan hingga pembunuhan, terjadi secara sporadis, tidak hanya mengorbankan warga setempat tapi juga warga asing.

Belakangan ini, keinginan merdeka dari OPM semakin mendapat dukungan karena pemerintah Pusat di Jakarta tidak menghargai hak orang Papua atas sosio-ekonomi, budaya, maupun adat istiadat lokal Papua. Kebijakan pemerintah menyangkut Papua dilakukan secara sentralistis. Pemanfaatan SDM dinilai hanya untuk pusat, sementara penduduk pribumi semakin merasa terpinggirkan oleh pendedat yang memiliki kultur yang berbeda.

Tawaran otonomi khusus Papua awalnya sedikit banyak disikapi positif pihak pribumi. Tapi, kemudian malah menjadi sebab meningkatnya eskalasi konflik antara pemerintah Jakarta dengan warga setempat, ketika Jakarta memecah Papua menjadi 3 propinsi. Pemekaran propinsi juga menyebabkan konflik antar warga pribumi. Di mata warga yang tak setuju, pemekaran propinsi akan menyebabkan pribumi menjadi lebih terpinggirkan. Warga pendedat akan lebih banyak, sementara pegawai negeri, tentara dan polisi dari luar Papua, akan meningkat jumlahnya.

Papua dengan luas wilayah 3,5 kali luas pulau Jawa itu, kini dihuni 2,7 juta jiwa dengan perbandingan warga pendedat dan pribumi adalah 60: 40. Sejak 2003 Papua mengalami penambahan 14 kabupaten baru dan kini total ada 28 kabupaten dan kotamadya. Jika pemekaran Papua menjadi 3 propinsi dilakukan maka dipastikan proporsi jumlah penduduk pribumi dan pendedat akan berubah cepat seiring waktu. Konflik antara pendedat dan pribumi terjadi karena kedua jenis penduduk ini memiliki latar belakang kultur yang berbeda. Karena itu diperlukan kajian yang sungguh-sungguh, di antara yang pokok mengenai kelanjutan pemberian Otonomi Khusus di Papua dan implikasi pemekaran Papua menjadi tiga propinsi. ■ (Lambang & Faried, SEACSN Indonesia).

A New Dimension of A Conflict in Papua

Separatism conflict in Irian Jaya Province or West Papua is now entering a new phase together with an issue on the partition of Papua province into three provinces. A conflict in Papua was rooted from the different response of a determination of people's opinion (PEPERA) sponsored by United Nations in 1969. Indonesian central government in Jakarta considers that the result of PEPERA as a final result. Meanwhile the local natives in Papua particularly an extreme group-OPM believe that the win of Indonesia in PEPERA 1969 was the result of an engineering done by Indonesian military that ignored a real aspiration of Papuan people.

After PEPERA, the conflict between two extreme groups, i.e. TNI aiming to guard national integrity of Indonesia and OPM demanding on separatism, has been occurring for years. The result of this conflict is that the civilians become the victims. Violence such as terror, abduction, and homicide not only sacrifices the local civilians but also foreigners.

Lately, the independence demand of OPM progressively gets the support from Papuan people because the central government in Jakarta does not appreciate the Papuans' rights for socio-economics, culture, and local customs of Papua. The government policy in Papua is conducted by centralistic. The nature resources use is just for the central, while the local people feel more pulled over by immigrants owning different culture.

In the beginning, the offer of special autonomy more or less got a positive response from the local people. But, it then oppositely becomes the cause of the increasing conflict escalation between the government in Jakarta with the indigenous people, when the Jakarta divides Papua into 3 provinces. The partition of province also causes the conflict among the indigenous people in Papua. For those citizens who do not agree, this partition will cause them become pulled over. The immigrants will be more and civil servants, military, and police from them become more intense.

Papua that is 3.5 wide times from Java is nowadays dwelt by 2,7 millions people with the comparison between the immigrants and the indigenous citizens is 60: 40. Since 2003 Papua has been added 14 new regencies and now the total number of the regencies in Papua is 28. If the partition of Papua into three provinces is conducted, the proportion number of indigenous inhabitants and the immigrants will change fast. The conflict between the immigrants and the indigenous citizens will occur because of their different backgrounds of culture. Consequently, a serious consideration on the continuation of giving special autonomy in Papua and the implication of the partition into three provinces is really needed. ■ (Lambang & Faried, SEACSN Indonesia).

PROGRAM PERTUKARAN

Exchange Program
SEACSN 2003 Periode Kedua

Penyebaran informasi mengenai *Exchange Program* SEACSN melalui surat, dan Web-site, tampaknya cukup memberikan hasil bagus. Periode kedua tahun 2003 program pertukaran peneliti dan *internship* SEACSN Indonesia telah menerima sembilan proposal. Latar belakang para kandidat berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan akademis, LSM, dan media massa. Pada periode kedua tahun 2003 ini koordinator SEACSN Indonesia mendapatkan cukup banyak ide dalam penelitian *Peace and Conflict Studies* di Asia Tenggara.

Bersamaan dengan bertambahnya jumlah pelamar program pertukaran ini, SEACSN telah menetapkan untuk semakin memperketat penyaringan dengan parameter ilmiah. Rapat antar koordinator untuk program pertukaran yang dilakukan di Kamboja bersamaan acara Regional Workshop di negara itu (27-29 Agustus 2003) menghasilkan kesepakatan tersebut. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas para peneliti yang masuk.

Sembilan proposal yang telah diterima oleh SEACSN Indonesia terbagi di dalam beberapa isu menarik dalam *area peace and conflict studies*. Isu-isu itu meliputi; Gerakan Masyarakat Sipil dan Demokratisasi di Thailand- Studi Kasus *civinet*, Identitas Sosial Etnik di Singapura Pembentukan Identitas Nasional, Trauma Healing, Aktor di dalam Globalisasi dan Demokrasi Kasus Myanmar, Transformasi Peran Perempuan dari Korban Menjadi Aktor *Peace Building*, Krisis Identitas Tiga etnis di Malaysia ditinjau dari Analisis Media Massa, Pengembangan Perdamaian di dalam Hubungan Antar Agama di Thailand, dan Peran Perempuan di dalam Resolusi Konflik Moro.

Isu-isu *peace and conflict studies* memang beragam di Asia Tenggara. Pada satu sisi konflik yang muncul merupakan persoalan yang harus dipecahkan. Pada sisi yang lain itu merupakan kekayaan bagi pengembangan sistem kehidupan manusia yang lebih baik dari sekarang. Pada dasarnya SEACSN Indonesia mengakomodasi berbagai ide-ide yang muncul ke dalam bentuk proposal program pertukaran yang nantinya bisa memberikan gagasan dan kekuatan perubahan sosial yang positif. ■ (Uly-SEACSN Indonesia)

Perdamaian memang mendapat tempat yang kecil di masyarakat dunia, namun perdamaian itu ada dan tidak hilang dari permukaan bumi

■ Abdurrahman "Gus Dur" Wahid

Seleksi Proposal Exchange
Program SEACSN

Proposal program pertukaran SEACSN dibagi menjadi dua bidang, yaitu proposal program magang dan proposal program penelitian. Kedua proposal itu berbeda pada metode pelaksanaan di lapangan. Magang lebih banyak mengikuti aktivitas lembaga tuan rumah (*host institution*) dan penelitian banyak terjun ke lapangan secara independen. Sehingga dalam penulisan, para pelamar harus memperhatikan perbedaan orientasi antara proposal penelitian dan magang.

Pada dasarnya kedua proposal harus menuliskan idenya dengan baik. Penulisan ide yang baik itu dapat berciri adanya fokus isu yang jelas, adanya penjelasan persoalan yang sistematis, tujuan program yang logis dan tepat, dan hasil yang akan diperoleh setelah program dilaksanakan.

Penyeleksian proposal sebenarnya mempunyai standar penilaian yang umum. Sebagai contoh, pada program pertukaran SEACSN secara khusus mengambil tema besar perdamaian dan resolusi konflik. Proposal yang masuk harus berisi tentang isu-isu berkaitan dengan tema perdamaian dan resolusi konflik. Isu itu misalnya tentang konflik agama, peran perempuan dalam resolusi konflik, konsep perdamaian masyarakat agama, dan lain sebagainya. Setelah ada fokus isu, proposal itu harus ada penjelasan persoalan yang sistematis dari isu yang sudah diangkat. Jika isu yang diangkat adalah peran perempuan dalam resolusi konflik maka penulis harus bisa menjelaskan apa saja yang menjadi persoalan penting dalam peran perempuan.

Parameter penyeleksian proposal yang masuk selain menggunakan standar penulisan proposal yang baik, setiap kali periode penyeleksian ada rapat pertemuan antar koordinator nasional dan koordinator regional. Rapat pertemuan itu akan menyeleksi proposal yang sudah lolos tahap sebelumnya berdasarkan penilaian-penilaian aktual. Artinya, isu-isu penting yang paling krusial di Asia Tenggara perlu mendapatkan perhatian. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberi cukup kejelasan pada para pelamar tentang parameter penilaian proposal program pertukaran SEACSN. Saat ini SEACSN Indonesia menunggu proposal baru untuk masuk dan berharap proposal yang masuk mempunyai kualitas yang baik untuk periode pertama tahun 2004. ■ (Novri-SEACSN Indonesia)



EXCHANGE PROGRAM

Proposal Selection SEACSN Exchange Program



The exchange program proposal are divided into two types, namely the internship and research programs. The two proposals have a difference in the method of conducting the activities in field. The internship program is more active in the host institution's programs whereas the research is directed to the proposed field activities independently. Therefore the applicants should relate to the different orientation between the research and internship programs.

Essentially, in each proposal, an idea should be written well. The writing is characterized by a clear issue, a systematic explanation of the problem, a logical and objective target, and a result of the program.

The selection of the proposal has a general standard that is the topics should be specifically about peace and conflict resolution. In addition, the proposals submitted are about the issue relating with the topic, such as the religion conflict, the woman's role in a conflict resolution, a peace concept of the religious community, and so on. After the issue focus, in the proposal there must be the systematic explanation of the problem from the chosen issue. For example, if the issue is about the woman's role in a conflict resolution, the applicant has to explain any kinds of the woman's role problem.

Beside the standard of the proposal, periodically there is a meeting between the national coordinators and regional coordinator of SEACSN. The meeting will select the best proposal as the final selection. The proposal will be selected based on its actuality. It means that important and crucial issues in South East Asia should get more attention. It is expected that this information can give the clarification to the applicants about the proposal parameter in the Exchange Program of SEACSN. Now SEACSN Indonesia is waiting for the new proposals and hoping that the submitted proposals will be in good quality for the first round of 2004. ■ (Novri-SEACSN Indonesia)

SEACSN Exchange Program (2nd Round)

Information spreading of SEACSN Exchange Program via letters, and Web Site, seems to quite give the good result. During the second round of SEACSN Exchange Program 2003, SEACSN Indonesia had accepted nine proposals. Backgrounds of all candidates came from various circle, such as from academic circle, NGO, and mass media. During the period the coordinator of SEACSN Indonesia had got quite a lot ideas about research for Peace and Conflict Studies in South-East Asia.

At the same time by increasing quantity of the program applicants, SEACSN had selected more strictly with the scientific parameter. The selection parameter for this round was actually decided together in the SEACSN coordination meeting in Cambodia as SEACSN Regional Workshop was also handled (27-29 August). The main target of this agreement was improving the quality of all incoming researchers.

Nine proposals that had been accepted by SEACSN Indonesia were divided into some interesting issues on peace and conflict studies area. The issues cover Civil Society Movement and Democratization in Thailand: The Case Study of the CIVICNET; Social Identity Malay-Singaporeans: Process of National Building Identity; Trauma Healing; Actors in Globalization and Democracy In Myanmar - Case Study about Globalization Influence to Democracy Actors Activities; The National Identity Crisis of three Ethnic Groups (Malay, Chinese And India) In Malaysia; Peace Development in inter-religious communities in Thailand; and Women's Role In Moro's Conflict Resolution.

The issues on Peace and conflict studies are indeed various in Southeast Asia. In one side, the emerging conflict is the problem that must be solved but in another side, it represents the richness for a better system development of human life. Basically SEACSN Indonesia accommodates various ideas, which emerge into the form of exchange program proposal that later can give the positive ideas and strength of social changes. ■ (Uly-SEACSN Indonesia)

If we assume that mankind has a right to survive then we must find an alternative to war and destruction

Jika kita beranggapan bahwa manusia memiliki hak untuk bertahan hidup maka kita harus menemukan pilihan lain untuk perang dan penghancuran

■ Martin Luther King Jr.

Konflik Negara - Masyarakat Sipil : Menuju Resolusi Konflik yang Demokratis

Masyarakat sipil di Asia Tenggara memiliki karakter khusus dengan keberagaman etnik dan agama serta perbedaan yang tajam dalam kondisi sosial budayanya. Ini membuat mereka teramat rentan terhadap konflik identitas. Konflik masyarakat sipil dengan negara di wilayah ini sering terjadi dalam bentuk konflik komunal, meskipun sumber konflik pada dasarnya bukan berasal dari isu etnis. Akibatnya, konflik seringkali teramat sulit untuk ditangani melalui mekanisme institusi politik yang tersedia.

Pemikiran tersebut menjadi tantangan bagi workshop yang diselenggarakan oleh SEACSN Indonesia, dengan mengambil tema " *State and Civil Society in Southeast Asia : Toward Democratic Conflict Resolution* ", di Hotel Raddin Sanur - Bali, 15 - 17 Oktober 2003. Tujuan utama workshop untuk mengidentifikasi akar konflik, isu - isu kritis serta mencari alternatif terbaik penyelesaian konflik antara negara dan masyarakat sipil dengan cara demokratis dan damai.

Dalam *keynote speech* nya, mantan Presiden R I, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa ASEAN menghadapi banyak tantangan untuk membangun perdamaian di wilayahnya. Kondisi ASEAN saat ini cenderung terbagi dalam 2 bagian. Bagian utara, kerap kali disebut sebagai kawasan utama, serta bagian selatan - yang terbagi berdasarkan perbedaan kemajuan di kedua wilayah tersebut. Hal ini akan menciptakan jarak antara wilayah utara dan wilayah selatan dalam menyelesaikan masalah di wilayah Asia Tenggara. Perkembangan ini membutuhkan perhatian untuk mencegah terjadinya perkembangan yang tidak seimbang serta ketegangan yang mungkin muncul di waktu yang akan datang.

Workshop dihadiri 40 peserta dari 9 negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei, ditambah dengan 3 orang *observer* dari lembaga internasional. Para peserta berasal dari latar belakang beragam, baik dari kalangan akademik maupun aktivis ornop yang bekerja dalam upaya penyelesaian konflik, serta menggalang perdamaian. Selama *workshop* berlangsung, terdapat 26 *paper* dengan beragam topik serta tema yang didiskusikan dalam sesi Panel, yang kemudian diperdalam dalam sesi Diskusi Kelompok. Panel diawali dengan menampilkan perbandingan umum pada level perspektif atas tema " *State, Civil Society and Democratization in Southeast Asia* ". Dalam sesi tersebut, 3 orang peserta dari Singapura, Thailand dan Filipina tampil menjadi panelis. Panel berikutnya di hari pertama, ditampilkan *Country Report* dari para peserta yang mewakili 9 negara ASEAN.

Secara umum, temuan yang muncul di hari pertama menunjukkan bahwa negara masih menjadi faktor dominan dalam hubungannya dengan masyarakat. Konflik muncul dalam beragam isu, seperti Kebijakan Publik, Identitas Politik, Institusi Politik, Konflik Etnik, Konflik yang berbasis Ekonomi serta isu Hak Asasi Manusia. Hasil dari Panel di hari pertama ini juga menunjukkan adanya

perbedaan tingkatan dari masyarakat sipil di antara negara - negara ASEAN, yang menempatkan masyarakat sipil di Filipina, Thailand dan Indonesia (terutama paska jatuhnya rezim Soeharto) lebih berkembang dibandingkan masyarakat sipil di negara - negara lainnya.

Pada hari kedua, Panel membahas tema " *State and Civil Society Conflict and It's Resolution* ", secara khusus dalam 3 (tiga) tema besar - Kebijakan Ekonomi, Desentralisasi dan Gerakan Sosial. Diskusi paling menarik pada hari kedua ini tercatat pada saat Antonio Pedro, Jr dari Filipina mempresentasikan makalahnya yang terkait dengan tema " *Social Movement, NGO and Democratization* ". Diskusi pada hari kedua ini diakhiri dengan panel dengan tema " *Approach to Democratic Conflict Resolution* ". Dalam panel terakhir ini 4 (empat) panelis mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan makalahnya, yaitu Smita Notosusanto dari Indonesia, Prof. Baladas Goshal dari Malaysia, Gus Miclat dari Filipina dan Dr. Pushpa Thambipillai dari Brunei.

Setelah panel yang berlangsung secara maraton di hari kedua, Diskusi Kelompok dilangsungkan pada hari ketiga. Peserta *workshop* dibagi dalam 3 (tiga) kelompok untuk mengeksplorasi 3 (tiga) isu utama yang sudah didiskusikan dalam panel di hari kedua. Sesi diskusi kelompok ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi, dengan mengacu pada hasil diskusi panel di hari pertama dan hari kedua. Dalam sesi diskusi kelompok ini, terlihat bahwa topik yang terkait dengan isu NGO dan Gerakan Masyarakat Sipil paling banyak menarik perhatian dari peserta *workshop*, dengan perbandingan komposisi peserta sejumlah 15 (lima belas) orang yang bergabung dalam kelompok tema tersebut, 9 (sembilan) peserta bergabung dalam kelompok yang membahas isu Reformasi Sektor Politik dan Keamanan serta 7 (tujuh) peserta lainnya bergabung dalam kelompok yang membahas isu Kebijakan Sosial Ekonomi.

Workshop yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini ditutup dengan sejumlah rekomendasi. *Pertama*, *workshop* menggarisbawahi pentingnya menjembatani jarak antara negara dan masyarakat sipil untuk mengurangi konflik. Dalam hal ini, hasil dari diskusi kelompok mendorong upaya mendemokratisasi ruang publik sebagai cara untuk menjembatani jarak yang tercipta tersebut. *Kedua*, untuk menyelesaikan konflik antara negara dan masyarakat sipil diperlukan mekanisme serta aturan main yang demokratis dan prosedur yang mengakomodasi partisipasi dan representasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dipikirkan akan mengurangi ketegangan yang ada, dengan diakomodasinya secara tepat kepentingan masyarakat dalam kebijakan negara. *Ketiga*, dari sudut pandang masyarakat sipil penting kiranya untuk membangun jaringan dan solidaritas untuk menegosiasikan posisinya di hadapan negara. Hal tersebut tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga merubah situasi konflik ke dalam hubungan yang lebih seimbang antara negara dan masyarakat sipil. ■ (Didin & Lambang, SEACSN Indonesia)

SEACSN ACTIVITY

State-Civil Society Conflict: Searching for Democratic Resolution

Civil society in Southeast Asia are characterized by ethnic and religious diversity and sharp social-cultural differences amongst its members. This makes the civil society in the region become very prone to identity conflicts. The state-civil society conflicts in the region



often manifest themselves to be violent communal conflicts, even though their sources basically are not ethnic issues. As consequence, the conflicts are very difficult to handle through the existing mechanism of political institution.

This is one challenge of the workshop held by SEACSN-Indonesia on *State and Civil Society in Southeast Asia: Toward Democratic Conflict Resolution*, in Bali, 15-17 October, 2003, to look for viable solution of state-civil society conflict in the region. The main objectives of the workshop were to identify the root causes, critical issues, and the best alternative resolution of state-civil society conflict in democratic and peaceful ways.

The former President of Indonesia, Abdurrahman Wahid, in his delivering keynote speech said, "ASEAN now is facing many challenges to build peace in the region. ASEAN is right now tending to divide themselves into two of the north or mainland and the south because of different progress, this will create gaps between the north and the south to solve the problem in the region. This development should get attention to prevent further unequal development and possibly tensions."

The workshop was attended by 40 participants from 9 countries of ASEAN; Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippine, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Brunei, plus 3 international observers. They came from different backgrounds, academia as well as NGO's activists.

During the workshop, 26 papers of various themes and topics were discussed in panel sessions and then explored more in group discussions. Starting from general comparative perspective on state, civil society and democratization in Southeast Asia, the panels then were followed by country report presentation from 9 ASEAN countries.

In general, the findings from the day one showed that state still became the dominant factor in its relation to civil society in the region. Conflicts manifested at various issues, such as public policy, political identity, political institution, ethnic conflict, economic base conflict and human right issues. The day one panel also

showed us the different levels of civil society among the ASEAN countries, which put the civil society in Philippine, Thailand and Indonesia (especially after the fall of Soeharto's regime) to be more developed than civil society in other countries in terms of its relationship to the

state.

At the day two, panels came up with state and civil society conflict and its resolution, under the three main issues - Economic Policy, Decentralization and Social Movements Issues. The most fruitful discussion for the day was when Antonio Pedro, Jr from Phillipine presented his paper on Social Movement, NGO, and Democratization. The discussion of the day ended with the panel on approach to democratic conflict resolution. There were 4 (four) panelists who presented their papers, namely Smita Notosusanto from Indonesia, Prof. Baladas Goshal from Malaysia, Gus Miclat from Phillipine and Dr. Pushpa Thambipilai from Brunei.

After the marathon panel at the day two, group discussion was held at the day three which is divided participants into 3 (three) groups to discuss the above 3 (three) main issues endorsed at the day two. The aim of the group discussion was to formulate recommendations based on the two day discussion. This session confirmed that the topics on NGO and Civil Society Movement was the most interesting issue for the participants, as 15 participants decided to join that group, while 9 participants joined the group on Political Security Reform and the rest of 7 participants joined the group discussing on the Social Economic Policy issue.

At the end, the workshop then came up with several recommendations. *First*, it is important to bridge the gaps between state and civil society to reduce the conflict. Democratizing public sphere is recommended by the discussion group for bridging the gaps. *Second*, resolving conflict between state and civil society needs a democratic rule of the game, democratic mechanism and procedure that allow open participation and representation of people in policy making process. This will reduce the tensions as people's demands are accommodated properly in state policy. *Third*, from civil society side, it is crucial for civil society to build networking and solidarity to bargain and negotiate their position to confront the state. This will not only resolve the conflict, but also transform the conflict in which state-civil society relation become more equal. ■ (Didin & Lambang - SEACSN Indonesia)

JARINGAN SEACSN

Aliansi Transformasi Konflik-Kamboja (ACT)

Masyarakat Kamboja yang mempunyai persoalan budaya kekerasan membutuhkan suatu lembaga yang mampu dan berkomitmen terhadap perubahannya, dari budaya kekerasan menjadi budaya damai. Salah satu lembaga yang ada adalah ACT. ACT merupakan suatu jaringan para praktisi peace building dan resolusi konflik baik individu ataupun institusi. Kamboja baru saja lepas dari konflik kekerasan yang meninggalkan masalah budaya kekerasan dalam masyarakat yang ditopang oleh peredaran senjata. Berangkat dari masalah tersebut, ACT bertujuan mengembangkan dan memperkuat mekanisme sosial yang efektif untuk perdamaian di Kamboja. ACT merupakan koalisi kelompok-kelompok yang diorganisir untuk bekerja sama guna mencapai keadilan dan persamaan social. Koalisi tersebut saat ini tengah memberikan ketrampilan-ketrampilan dan pengetahuan di bidang resolusi konflik dan peace building. Organisasi ini di bentuk dan menjadi aktor kolektif yang bekerja pada resolusi konflik dan peace building di masyarakat Kamboja. Anggotanya memiliki latar belakang dan ketrampilan masing-masing.

Salah satu hal yang seharusnya dipecahkan oleh ACT adalah bagaimana mentransformasi budaya kekerasan dalam masyarakat. Strategi yang dilaksanakan adalah meningkatkan kapasitas praktisi pada bidang perdamaian dan resolusi konflik melalui pelatihan, lokakarya, kerja sama, dan jaringan. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk membentuk agen perdamaian dalam masyarakat yang tugasnya adalah mentransfer pengetahuan perdamaian dalam kesadaran masyarakat, seperti yang telah dilakukan oleh ACT dalam memberi pelatihan pada praktisi dan aktivis NGO lokal di Propinsi Battambang-Kamboja pada awal September 2003. Pelatihan ini diharapkan menjadi media untuk membentuk agen-agen perdamaian di Battambang guna mentransfer masyarakat mengenai pengetahuan dan ketrampilan perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan.

Masalah kekerasan juga merupakan masalah pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan. Budaya kekerasan juga memperumit masalah peredaran senjata. Sehingga, mentransformasi budaya kekerasan adalah salah satu cara memecahkan persoalan peredaran senjata. Banyak media yang digunakan untuk mentransformasi budaya kekerasan, yaitu lokakarya, pelatihan, penelitian, dan konferensi komunitas berbasis level nasional dan internasional. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang perdamaian ACT ingin mendasari dirinya dengan nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan, perdamaian, keadilan, non-diskriminasi, semangat tim yang kuat, aksi secara damai, transparansi, dan akuntabilitas. Seandainya semua orang Kamboja menerima nilai-nilai dasar tersebut, Kamboja mungkin akan menjadi negara bangsa yang damai. ■ (Uly-SEACSN Indonesia).

Perkumpulan Institut Dayakologi (Kalimantan Barat)

Institute Dayakologi adalah organisasi masyarakat di Kalimantan Barat yang berdiri pada tahun 1990. Organisasi ini diketuai oleh Drs. John Bamba dengan beberapa anggota aktif. Salah seorang dari anggota yang aktif tersebut dan pernah berpartisipasi dalam Lokakarya Nasional SEACSN Indonesia: Perdamaian dan Resolusi Konflik-Strategi dan Aksi Lapangan pada tanggal 17-19 Oktober 2002 di Yogyakarta adalah Margareta Tri Wahyuningsih.

Dari presentasi Margareta untuk *workshop* ini tentang pengalaman kerusuhan etnis di Kalimantan Barat dan berbagai usaha yang dilakukan untuk penyelesaian konflik, dapat dirasakan bagaimana Institut Dayakologi ikut berperan aktif dalam resolusi konflik di Kalimantan Barat.

Secara mendasar misi dan sekaligus fokus utama Institut Dayakologi adalah melakukan revitalisasi dan restitusi budaya adat Dayak di Kalimantan; melakukan pemberdayaan masyarakat sipil; dan berusaha menciptakan rekonsiliasi; perdamaian dan kehidupan dalam komunitas-komunitas yang berbeda di Kalimantan Barat. Wilayah kerjanya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Kerja-kerja yang telah dilaksanakan adalah penelitian, publikasi dan dokumentasi data, kerjasama antar LSM, dan publikasi *the Kalimantan Review*. Jaringan kerja Institut Dayakologi melingkupi jaringan kerja lokal, nasional dan internasional. Jaringan kerja yang sudah luas itu membuktikan bahwa Institut Dayakologi telah banyak melakukan aktifitas pada level lokal, nasional dan internasional. ■



Kontak – Perkumpulan Institut Dayakologi

Alamat:
Jl. Budi Utomo Blok A3/3-4
Pontianak 78113

Phone/Fax: (0561) 884567-
Fax. (0561) 883135

Email/Website:
i.dayakologi@ptk.centrin.net.id

NETWORKS

Institute of Dayakology (West Kalimantan)



Institute of Dayakology is a mass organization in West Kalimantan established in 1990. This organization is led by Drs. John Bamba with a few active members. Margareta Tri Wahyuningsih was an active one in Institute of Dayakology who had participated in a National Workshop on "Peace and Conflict Resolution – Strategy and Field Action" conducted by SEACSN Indonesia during 17-19 October 2002 in Yogyakarta.

From her presentation for this workshop about an experience of ethnic riot in West Kalimantan and any efforts done for conflict resolution, it could be known that the institute of Dayakology actively participated in conflict resolution in West Kalimantan.

Basically both mission and focus of the institute are revitalizing and restituting Dayaknese culture in Kalimantan; empowering civil society; and building reconciliation, peace, and life in different communities in West Kalimantan. The field areas of the institute are West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, and South Kalimantan.

Activities they have done are research, publication and data documentation, cooperation with NGOs, and publication of *the Kalimantan Review*. The networking of the institute covers local, national, and international networking. This broad networking they have indicates that the institute has conducted many activities at local, national, and international levels. ■

Contact – Institute of Dayakology

Address:

Jl. Budi Utomo Blok A3/3-4
Pontianak 78113

Phone/Fax: (0561) 884567-

Fax. (0561) 883135

Email/Website:

i.dayakologi@ptk.centrin.net.id

Alliance for Conflict Transformation Cambodia (ACT)

Cambodian Society having cultural problem of violence require capable institutions that have commitments to its change, from violent culture to peaceful culture. One of existing the institutions is ACT. ACT is a network of peace building and conflict resolution practitioners, both individual and institution. Cambodia has just passed the violent conflict that leaves the problem of violent culture in the society where the weapon circulation sustains that culture. Based on the problem of the violent culture in the society ACT aims to develop and strengthen effective social mechanisms for peace in Cambodia. Actually, ACT is a coalition of groups who are committed to working together to achieve social justice and equality. They have been providing skills and knowledge in the area of conflict resolution and peace building. This organization was formed and became a significant collective actor working on conflict resolution and peace building in the Cambodian society. The members of ACT have own background and skill.

One thing should be solved by ACT is how to transform the violent culture in the society. A strategy that can be conducted is to build capacity of practitioners in the area of peace and conflict resolution through training, workshop, cooperation, and networking. The training is aimed to create the peace agency in the society whose job is transferring the peace knowledge into the consciousness of the society such as what had been done by ACT to train the local practitioners and NGO activists in the province of Battambang-Cambodia on early September 2003. It was hoped that the training became the media to create the peace agencies in Battambang, to transfer the society about the peace knowledge and skill to solve dispute without violence.

The violence is also the problem for the government to succeed its development program. When the development in Cambodia needs the social stability, the people still use the violence as the way to solve their dispute. The cultural violence also complicates the problem of weapon circulation. Then, transforming the violent culture become the peace culture in the Cambodian society is one way to solve the problem of weapon circulation. Many media are used to transform the violent culture i.e. training, workshop, seminar, research, and conference from the community base up to national and regional levels. As the peace organization ACT wants to base itself by its core values such as humanity, peace, justice, non-discrimination, strong team spirit, independence, acting peacefully, transparency and accountability. If all the Cambodian people accept the core values, Cambodia will probably become a peaceful nation state. ■ (Uly-SEACSN Indonesia)

PENGALAMAN

Peredaran Senjata dan Peran NGO di Kamboja

(Pengalaman di ACT Cambodia)

Bagi orang Kamboja rasa aman masih menjadi cita-cita. Senjata adalah alat untuk melindungi rasa tak aman mereka. Senjata tersebut juga digunakan untuk menjaga diri dan ke-luarga dari ancaman tindak kriminal. Mereka juga belum percaya bahwa pemerintah dan aparaturnya mampu menjamin rasa aman. Karena itu, upaya pelucutan senjata, belum mereka terima sepenuhnya. Demikianlah sekelumit cerita Ulyati Retno Sari, peserta *Exchange Program* SEACSN dari Indonesia. Ulyati melalui program ini mendapat kesempatan magang di Alliance for Conflict Transformation (ACT), sebuah NGO Kamboja yang aktif dalam transformasi konflik, dengan agenda *peace education*, *peace building*, dan *conflict resolution*.

Selama Agustus-September 2003, Ulyati terlibat beberapa kegiatan ACT. Ia membantu ACT melaksanakan agenda pertemuan regional dan *workshop* SEACSN. Ia juga berkesempatan menjelajah beberapa NGO di Kamboja dan bertemu dengan banyak pihak di antaranya sejumlah aktifis NGO dari Kamboja dan NGO internasional untuk berbagi pengalaman mengenai soal perdamaian secara umum, maupun soal khusus pelucutan senjata. Staf peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM ini terlibat aktif dalam diskusi-diskusi berharga yang difasilitasi ACT maupun SEACSN. "Dari banyak kawan di NGO-NGO di Kamboja, saya mendapat masukan bagaimana tidak mudahnya upaya pelucutan senjata, membangun perdamaian dan menciptakan rasa aman yang permanen," ujar Ulyati.

Dr. Neb Shintay, Direktur Working Group for Weapon Reduction (WGWR), Kamboja menceritakan pada Ulyati, upaya pelucutan senjata merupakan pekerjaan yang rumit. Pertikaian kecil antar warga di jalanan misalnya, melibatkan penggunaan senjata. Dengan kondisi lapangan seperti ini, NGO seperti WGWR biasanya mendukung kegiatan pelucutan senjata dengan aktivitas training perdamaian. Penduduk harus diyakinkan dulu bahwa rasa aman bisa dicapai tanpa senjata di tangan. "Dengan training perdamaian maka pelucutan senjata bisa dilakukan lebih efektif," ujar Neb Shintay sebagaimana dikutip Ulyati.

Bersama ACT, Ulyati ikut membantu persiapan training mengenai *peace building* di propinsi Battambang, Kamboja. Training yang didukung sejumlah NGO lokal ini selain melibatkan warga setempat, juga mengundang aparat pemerintahan lokal. Transfer pengetahuan mengenai perdamaian diharapkan terjadi. ACT memang tidak terlibat langsung dalam pelucutan senjata sebagaimana WGWR. Tapi, training-training perdamaian yang dilakukannya berdampak besar pada terciptanya kondisi untuk proses pelucutan senjata. Sejumlah NGO internasional seperti EU-ASAC, JCCP, dan JSAC, ikut pula berperan aktif dalam proses disarmament dan secara luas terlibat dalam proses perdamaian di Kamboja. ■ (Fariied-SEACSN Indonesia).

Gerakan Perempuan di Ambon

Bagaimana perempuan dalam konflik kekerasan? Perempuan sering menjadi korban dari kekerasan konflik, tapi apakah hanya menjadi korban? Suster Brigitta seorang aktivis Gerakan Perempuan Peduli mengatakan lain. Perempuan bisa ikut berperan menghentikan kekerasan melalui kelembutan yang ia miliki. Kelembutan perempuan adalah kekuatannya. Seperti dalam kasus konflik kekerasan di Ambon di mana kekerasan muncul, salah satu usaha yang dilakukan perempuan di sana adalah bagaimana mereka bisa menyentuh kekerasan dengan kelembutan. Pendekatan yang digunakan oleh Gerakan Perempuan Peduli adalah pendekatan rohani, yaitu memanfaatkan kehalusan para perempuan (ibu-ibu). Lalu para perempuan membuat berbagai gerakan dan memulainya dengan demo ke pemerintah daerah, membuat leaflet dengan menuliskan anti kekerasan.

Pemberdayaan perempuan mesti bisa dilaksanakan agar perempuan bisa bergerak untuk perdamaian. Gerakan ini tidak mengutamakan agama tetapi manusia-manusia. Jadi selain pemberdayaan ada langkah taktis yang disebut dana bergulir, ini untuk memperkuat solidaritas perempuan. Selain itu gerakan perempuan juga mengupayakan rekonsiliasi antar perempuan sendiri karena ada perbedaan pandangan yang dapat berakibat negatif pada perdamaian. Sebenarnya gerakan perempuan peduli tidak membatasi diri bahkan memperluas jaringan untuk perempuan di mana saja dan juga kaum laki-laki yang peduli terhadap perempuan dan anak. Pada dasarnya gerakan utama adalah menghentikan kekerasan dan pertikaian, itu cita-cita yang universal.

Gerakan perempuan peduli pun tidak terlepas dari halangan baik dari luar atau dalam gerakannya dalam menghentikan kekerasan di Ambon. Seperti kasus gerakan perempuan mendapatkan halangan dari TNI, yaitu ketika ada pengungsi yang akan bergabung tidak dibolehkan dan dihalang-halangi. Pemberdayaan pengungsi merupakan bagian penting dari gerakan perempuan, tetapi halangannya cukup besar. Walaupun halangan itu besar itu tidak berarti perempuan harus berhenti, atau kekerasan semakin leluasa menerkam rasa aman. ■ (Novri, Sumber: Presentasi St. Brigitta dalam Lokakarya Nasional-Strategi dan Aksi Lapangan, SEACSN Indonesia)

respect for human rights is the fundamental foundation condition and the sole, genuine guarantee of true peace

■ Václav Havel

EXPERIENCE

The Woman Movement in Ambon



How is a woman in a violent conflict? In a violent conflict a woman often becomes a victim - but is she just a victim? St. Brigitta, an activist of The Woman Care Movement in Ambon says different. The Woman can play the role on stopping the violent conflict by using her softness that is actually her power. As in the case of the violent conflict in Ambon in which the violence emerged, an effort of the Ambonese women was touching the violence with their softness that was also considered as their spiritual approach in facing the violent conflict. Then, the women made many movements and began with some demonstrations to the government, and made anti violence leaflets spread to the government official and common people.

The woman empowerment has to be conducted in order that women can play the role on the peace movement. The movement focuses on the humanity rather than the religion. Therefore, besides the empowerment there was a strategic step called as a circulating donation to support the woman solidarity. Furthermore, the women also tried to seek reconciliation among the women themselves because there were different views that could impact negatively on peace. Actually, the Women Care Movement did not limit itself, it more even widened the network to the women in everywhere and the men who care about the women and children. Basically, the main movement was to stop the violence and conflict, that was a universal goal.

In addition, the empowerment of the Women Care Movement was not free from the obstacles coming from either the outside or inside its movements in stopping the violence in Ambon. In one case, The Women Care Movement got the obstacle from TNI - When the refugees would join in the movement, TNI hindered them. The refugee empowerment was the important part of the women movement, but the obstacles were so big at that time. However, it does not mean that the women there had to stop unless the violence would threat security. ■ (Novri, Source: Presentation of St. Brigitta in the National Workshop II of SEACSN Indonesia: Strategy and Field Action)

Weapon Circulation in Cambodia

(Experience of SEACSN
Exchange Program in Cambodia)

For Cambodian people, safe feeling still becomes their dream. A Weapon is a means for them to protect from their insecure feelings. They use the weapons for guarding themselves and their families from a criminal threat and attack. They even do not trust that Cambodian government and state apparatus can guarantee their safe feelings. In consequence, a disarmament program conducted by the government has not been fully accepted by them. The above is a true small part story of Ulyati Retno Sari, a participant of SEACSN Exchange Program from Indonesia. Through the exchange program, she got an opportunity to carry out her internship program in Alliance for Conflict Transformation (ACT), an NGO in Cambodia that is active in a conflict transformation with its agenda of peace education, peace building, and conflict resolution.

From August-September 2003, Ulyati participated in some activities of ACT. She assisted ACT to conduct the agenda of SEACSN regional meeting and workshop. She also had an opportunity to explore some NGOs in Cambodia and meet many parties including a number of Cambodian NGO activists and international NGOs to share experience of peace in general, and disarmament in particular. Ulyati who is also a research staff of the Center for Security and Peace Studies, Gadjah Mada University (CSPS-UGM) actively got involved in some important discussions facilitated by ACT and SEACSN. "From many friends of NGOs in Cambodia, I get many inputs on how difficult to strive for disarmament, peace building, and permanent safe situation", Uly said.

Dr. Neb Shintay, a Director of Working Group for Weapon Reduction (WGWR) in Cambodia, informed that an effort for disarmament was a complicated work. A small dispute between the citizens on the street, for example, involves the weapon use. Based on this field condition, the NGO, like the WGWR usually supports the disarmament program by conducting peace-training activities. Residents have to be assured that safety can be reached without weapons on hand. "By the peace training, the disarmament program can be conducted more effectively," said Neb Shintay as cited by Ulyati.

Moreover, together with ACT, Ulyati assisted for the preparation of training on peace building in Battambang Province, Cambodia. The training supported by a number of local NGOs involved the local people and invited government apparatus in the province. It was hoped that in the training, a knowledge transfer could be reached. ACT does not get involved directly in the disarmament program as WGWR but its peace-trainings affect importantly to create a conducive situation for succeeding the disarmament program. A number of international NGOs, like EU-ASAC, JCCP, and JSAC, also actively participates on the disarmament process and widely gets involved in the peace process of Cambodia. ■ (Faried-SEACSN Indonesia).

Jurnalisme dan Perang: Menggagas Perdamaian Melalui Jurnalisme

Amerika meng-invasi Irak. Alasannya negeri beribukota Bagdad itu memproduksi bom pembunuh massal. Hasilnya, sama sekali tidak ditemukan adanya bom pemusnah massal melainkan kerusakan massal dari bom-bom Amerika di Irak. Perang adalah gambaran buruk bagi umat manusia. Perang menciptakan k a m p - k a m p pengungsian, dan

ribuan ketakutan harus berlari-lari di bawah kejaran pesawat pemburu. Sejarah dunia hampir tidak pernah lepas dari peperangan yang terjadi di antara kelompok manusia dan antar negara. Perang untuk menjajah, membela harga diri, mempertahankan wilayahnya, atau memperebutkan wilayah.

Realitas dalam perang ini merupakan topik yang penting untuk diangkat ke publik. Salah satu bagian penting yang dapat mengangkat realitas di dalam perang adalah kerja jurnalisme. Berkaitan dengan topik ini, PSKP UGM dan Lembaga Indonesia Perancis bekerjasama mengadakan diskusi terbuka pada 5 Juli 2003 dengan topik Jurnalisme Perang: Menggagas Perdamaian Melalui Jurnalisme. Diskusi ini diselenggarakan di PSKP UGM dengan dua narasumber. Seorang Jurnalis independen Internasional dari Perancis Gregoire Deniau dan Lambang Trijono Sosiolog Konflik UGM. Peserta yang menghadiri diskusi itu berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, elemen-elemen sipil, dan wartawan.

Gregoire mempresentasikan liputannya tentang Perang Irak-Invasi Amerika ke-2 dan perang Pantai Gading. Sebelumnya, Gregoire mencoba memberikan kejelasan posisinya sebagai seorang jurnalis independen yang tidak diatur oleh politik. Kepentingannya adalah mengungkap realitas yang ada di dalam perang Irak termasuk tentang bagaimana satu keluarga Irak menghadapi perang.

Ada realitas lain yang diungkap Gregoire dalam kerja jurnalismenya selain isu senjata pemusnah massal kimia yang diisukan Amerika, politik Saddam yang diktatorial, atau terorisme, yaitu kehidupan sipil yang



bertahan dari perang dengan spirit perdamaian. Realitas menggambarkan kepanikan, keresahan, tatkala rentetan tembakan dan ledakan bom memecah keseharian mereka. Mereka bertahan dengan tetap menyanyi, memasak, menari, berdiskusi tentang hari esok. Mereka juga memberi minuman dan makanan bagi para tentara Irak yang

mempertahankan negara mereka. Itu karena mereka hanya ingin mencintai dan mempertahankan kehidupan damai mereka yang dikhianati perang.

Pengungkapan realitas dalam perang oleh jurnalis sendiri merupakan satu fenomena tersendiri. Pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi antara lain sekitar bagaimana jurnalis bisa menjadi independen dari politik, dan dari sisi mana realitas itu mesti diungkapkan. Lambang Trijono dalam konteks jurnalisme mencari perdamaian mengharuskan adanya orientasi melawan kekerasan yang terkonstruksi dalam perang. Kerja jurnalis untuk perdamaian adalah memberikan klarifikasi terhadap kekerasan yang menggumuli ketenangan manusia.

Sebagai jurnalis independen, Gregoire mempunyai prinsip independen dalam menginformasikan filmnya. Prinsip independensi ini digunakan untuk memberikan informasi yang luas terhadap publik tanpa keinginan mengkonstruksi maksud-maksud kekuasaan. Sehingga hal ini membuat seorang jurnalis harus berhati-hati dalam meliputi realitas yang ada di dalam perang.

Menggagas perdamaian melalui jurnalisme memang harus terus dilakukan. Opini yang akan dibentuk adalah ide perlawanan terhadap kekerasan. Bagaimanapun, perdamaian merupakan dunia yang diidamkan siapapun dan diperjuangkan melalui berbagai sektor sipil, termasuk jurnalisme. Jurnalisme mampu memberikan pengaruh yang besar khususnya terhadap ide perdamaian. ■ (Novri, PSKP UGM)

CSPS COLUMN

Journalism and War: Initiating Peace through Journalism

America attacked Iraq in its invasion as according to America the country with Baghdad as the capital produced the mass murderer bomb. The result was nothing found about the mass murderer bomb but the mass damages caused bombs of America in Iraq. The war is a plight for human being. It creates the refugee camps, and thousand of fears must run away under the war machine. Almost the world histories were not ever separated from the war among groups and inter-states. The war is used for colonizing, defending a dignity, and striving for own region, or fighting for region.

The reality in the war is an important topics to discuss in publics. One of the parts can raise reality in the war is journalistic work. Due to the topics, CSPS – UGM in cooperation with *Lembaga Indonesia Perancis (LIP)* conducted a public discussion on 5 July 2003 within War Journalism: Initiating Peace through Journalism as its topics. The discussion took place in CSPS- GMU with two source persons i.e. an independent international journalist from France, Gregoire Deniau and Lambang Trijono, a sociologist of conflict from UGM. The participants that attended the discussion were academicians, students, civil society elements, and journalists.

In the discussion, Gregoire presented his report about the Iraq war II in America's attack and the war of Pantai Gading (Ivory Coast War). Firstly, Gregoire explained his position as an independent journalist that was free from the political influence. His interest was exposing the reality in Iraq war including how one family faced the war.

There was another reality expressed by Greogire in its journalist job besides issues of America on the chemical mass destroyer, dictatorial politics of Saddam Hussein and terrorism, was defensive civil life from war by spirit of peace.

Reality depicted panics, restlessness, as gunfire and explosion bomb broke all day long. They held out by singing, cooking, dancing, discussing about tomorrow day.

They also gave the re-

freshments to all Iraq armies struggling for their state. It was because they only wished to love and maintained their peaceful life betrayed by the war.

Reality expression in the war by a journalist himself was one separate phenomenon. Questions in discussion for example about how journalist could become independent from politics and from which side of that reality must be revealed. Lambang Trijono in the context of journalism looking for the peace obliged the existence of orientation of opposing constructed violence in the war. The work of the journalist for the peace was giving the clarification to the violence that disturbed human being serenity, according to Trijono.

As an independent journalist, Gregoire has independent principles in informing his film. This Independent principle is used to give the wide information to public without desire of construction of power intentions. So that this matter makes a journalist has to take a care in covering reality in the war.

Initiating peace through journalism should be indeed continued. Opinion that will be formed represents an idea of resistance to violence. However, peace is a world craved by human being and fought for through any civil sectors including journalism. Journalism can give a big influence particularly to the peace idea. ■ (Novri, CSPS UGM)



Militer, Transisi dan Resep Huntington

Peralihan kekuasaan dari rezim otoriter Orde Baru ke rezim reformasi menyisakan banyak persoalan termasuk militer. Sebagai institusi yang memiliki otoritas menjaga stabilitas keamanan, militer dinilai ikut bertanggungjawab terhadap kejahatan yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun persoalannya, dengan fondasi rezim transisi yang masih rapuh, bagaimana dan kapan kejahatan itu layak dipertanggungjawabkan?

Desakan supaya militer diadili sekarang juga telah mengundang kekhawatiran banyak pihak akan bangkitnya kembali militer dalam kancah politik dan kekuasaan. Sementara itu, jika proses pertanggungjawaban hukum tidak dilakukan saat ini, maka dikhawatirkan akan terjadi *impunity* terhadap pelaku kejahatan masa silam dan memberi peluang bagi terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Menjawab dua kekhawatiran ini sangat problematis, karena masing-masing solusi memiliki kualitas resiko yang relatif sama.

Pakar politik, seperti Samuel P. Huntington mengakui problematika ini dengan mengatakan bahwa militer merupakan salah satu variabel yang sulit diposisikan pada masa transisi. Karena itu, menurut Huntington hal yang paling mungkin dilakukan adalah; "jangan mengajukan ke pengadilan, jangan menghukum, jangan memaafkan dan jangan melupakan".

Resep ini didasari oleh asumsi bahwa militer masih menjadi kekuatan potensial untuk merebut kekuasaan sehingga terbentuk kembali rezim otoriter. Untuk mengurangi peran politik militer dalam bidang politik dan kemudian menaklukkannya, maka resep di atas menurut Huntington cocok dipakai, paling tidak untuk menghindari terulangnya kembali kejahatan militer.

Namun, di pihak korban, resep Huntington sulit diterima, karena proses menunggu dapat mendistorsi penderitaan mereka. Lagi pula resep tersebut tidak memiliki garansi yang pasti akan lahirnya sebuah rezim demokratis yang mengakomodir hak-hak korban. Oleh karena itu, proses peradilan dan penghukuman harus tetap dilakukan meski harus ada perjuangan yang keras untuk menghormati penderitaan korban yang telah dirampas hak-haknya. Pada penghormatan atas hak-hak korban itulah terdapat perdamaian. ■ (Sahlan Hanafiah - Koordinator LIDI Peace & Mahasiswa Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM Yogyakarta)

MPRK dan Ilmu Perdamaian

Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM) kembali akan memulai tahun ajaran baru pada awal bulan Februari 2004. Dengan melihat komposisi mahasiswa selama dua angkatan yang telah ada, maka untuk tahun ajaran mendatang MPRK-UGM akan membuat beberapa perubahan dalam kurikulum yang diajarkan.

Oleh karena latar belakang mahasiswa MPRK-UGM yang beragam, yaitu dari kalangan akademisi, LSM dan pemerintahan maka materi yang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa sesuai latar belakangnya menjadi diperlukan. Pada semester pertama, mahasiswa masih mengikuti mata kuliah wajib yang terdiri dari Cakupan dan Metode Resolusi Konflik; Negosiasi, Mediasi dan Peran Pihak Ketiga; Penghentian Konflik dan Proses Perdamaian; Filsafat Resolusi Konflik; serta Keamanan Kemanusiaan. Mata-mata kuliah tersebut di atas merupakan

mata kuliah dasar bagi mereka yang ingin mempelajari perdamaian dan resolusi konflik lebih lanjut.

Pada semester kedua, selain diberikan dua mata kuliah wajib, yang ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam penulisan tugas akhir, yaitu Metode Penelitian Sosial dan Analisis Kebijakan serta Pengambilan Keputusan. Para mahasiswa juga mulai diarahkan sesuai dengan bidang maupun minat masing-masing. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah yaitu Hukum dan Resolusi Konflik; Analisa Strategis; Isu Keamanan Lintas Negara; Reformasi Sektor Keamanan; Polisi dan Pemolisian; Pemberontakan dan Pemisahan Diri; Politik dan Pemerintahan Lokal; Etnisitas dan Integrasi Nasional; Politik Ekonomi Pembangunan; Politik Ekonomi Pendayagunaan Sumber Daya Alam; Masalah Pertanahan dan Perubahan Sosial; Konflik Industri; serta Hubungan antar Tingkat Pemerintahan. Pada semester tiga, para mahasiswa menyelesaikan program master mereka baik dalam bentuk thesis minor maupun mayor.

Diharapkan ketika mahasiswa telah menyelesaikan kuliah, mereka sudah mempunyai bekal yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan ketika mereka masuk dalam program MPRK-UGM seperti yang mereka tulis dalam *essay* yang menjadi persyaratan pendaftaran dan mereka dapat menerapkan ilmu mereka ke daerah asal masing-masing. Semoga... ■ (Doddy-MPRK, UGM)



CORNER

Military, Transition, and Concept of Huntington

Power transition from authoritarian regime of New Order to Reformation regime leaves over a lot of problems including the military. As an institution owning authority to maintain the security stability, the military is assessed to hold responsibility for any crimes happened during New Order era. But the problem is how and when the crimes can be properly justified with a powerless foundation of the transition regime.

Demand on bringing the military to justice by now has invited worries of many parties with the awakening of military in politic arena and power. Meanwhile, if the process of law responsibility is not done in this time, there will be impunity for crime actors in the past and opportunity for the happening of crime in the future. In reply to these two worries, it is very problematic since each solution owns the equal relative risk.

A Political expert, like Samuel P. Huntington confesses this problem by saying that the military represents one of difficult variables positioned at a period of transition. In consequence, according to Huntington, a matter that is likeliest done is; " don't bring to trial, don't punish, don't forgive and don't forget".

This formula is constituted by an assumption that the military still becomes the potential strength to grab the power so the authoritarian regime may be re-formed. To reduce the role of the military in politics and later conquer them, the above formula according to Huntington is compatible used, at least to avoid recurring of returning military offence.

But, for victim party, the formula of Huntington is difficult to accept because a waiting process can distort their suffering. Moreover the formula does not own a definitive warranty for a birth of democratic regime accommodating victims' rights. Therefore, the process of jurisdiction and punishment has to remain to be conducted although there must be a hard struggle to respect the suffering of victims whose rights had been abused. At respect for the rights of the victims there is a peace indeed. ■ (Sahlan Hanafiah; Coordinator of LIDI Peace and A Student of MPCR-UGM, Yogyakarta)



Master Program of Peace and Conflict Resolution (MPCR) and Peace Science

Master Program of Peace and Conflict Resolution - Gadjah Mada University (MPCR-GMU) re-be-gins the new curriculum on early February 2004. Based on the student composition of two years before, in the next academic year MPCR GMU will change some curriculums.

Because of various backgrounds of MPCR students, such as from the academicians, NGOs and the government, the curriculum in accordance with the students' backgrounds are necessary. In the first semester, the students should follow the core courses such as Scope and Methods of Conflict Resolution; Negotiation, Mediation and The Role of Third Party; Conflict Termination and Peace Process; The Philosophy of Conflict Resolution; and Human Security. The core courses above are for those who want to learn peace and conflict resolution in the next level.

In the second semester, besides fulfilling two core courses, i.e. Social Research Method and Policy and Decision Making Analysis in order to support students for composing their graduation papers, the students are directed to their focus areas and interests. They can choose selective courses, i.e. Law and Conflict Resolution; Strategic Analysis; Transnational Security Issues; Security Sector Reform; Police and Policing; Insurgency and Secessionist movement; Ethnicity and National Integration; Local Politics and Governance; The Political Economy of Development; The Political Economy of Natural Resource Use; Agrarian Problems and Social Change' Industrial Conflict; and Intergovernmental Relation. In the third semesters the students are supposed to finish their master program in either minor or major thesis.

When the students finish their study, it is expected that they can have skills as the goal written in their requirement essays and apply their skills in their each area. ■ (Doddy-MPCR, UGM)

EVENTS & AGENDA

Peristiwa

Lokakarya Asia Pasifik, 'Pembelajaran Pengalaman dari Asia Tenggara dan Asia Pasifik dan Usaha Pembangunan Perdamaian' oleh PSKP UGM bekerja sama dengan European Center for Conflict Prevention (ECCP) Bali, 5-7 Mei 2003

Diskusi Bulanan, "Perang dan Jurnalisme Damai" diorganisir oleh PSKP UGM bekerja sama dengan Lembaga Indonesia Perancis (LIP) Yogyakarta Jogjakarta, 5 Juli 2003

Proyek Penelitian Pemetaan Konflik- Indonesia Seminar Nasional "Pemetaan Konflik di Indonesia: Demokrasi dan Perdamaian" Jogjakarta, 12 - 13 Agustus 2003

Pertemuan Regional SEACSN diorganisir dengan Koordinator SEACSN Regional bekerja sama dengan dengan PSKP UGM Bali, 13-14 Oktober 2003

Lokakarya Regional Konflik Negara - Masyarakat Sipil: Menuju Resolusi Konflik yang Demokratis oleh PSKP UGM bekerjasama dengan SEACSN Hotel Raddin Sanur - Bali, 15 - 17 Oktober 2003

Diskusi Bulanan, 'Partai Politik, Desentralisasi, dan Pemilu Mendatang' diorganisir oleh PSKP UGM Jogjakarta, 3 November 2003

Agenda

Pertemuan Regional SEACSN oleh Koordinator Regional SEACSN Chiang Mai-Thailand, 17-21 Desember 2003

Konferensi Internasional SEACSN oleh Koordinator Regional SEACSN bekerjasama dengan SIDA-Swedida Penang Malaysia, 12-15 Januari 2004

Events

Asia Pacific Workshop on 'Lesson Learned from Southeast Asian and Pacific Peace building Efforts' Organized by CSPS GMU in cooperation with European Center for Conflict Prevention (ECCP) Bali, 5-7 May 2003

Monthly Discussion on War and Peace Journalism Organized by CSPS UGM in cooperation with Lembaga Indonesia Perancis (LIP) Yogyakarta Jogjakarta, 5 July 2003

Conflict Mapping Research Project National Seminar "Conflict Mapping in Indonesia : Peace and Democracy" Jogjakarta, August 12 - 13, 2003

SEACSN Regional Meeting Organized by Regional Coordinator of SEACSN in cooperation with CSPS UGM Bali, 13-14 October 2003

Regional Workshop State and Civil Society in Southeast Asia: Toward Democratic Conflict Resolution Organized by CSPS UGM in cooperation with SEACSN Hotel Raddin Sanur - Bali, 15 - 17 October 2003

Monthly Discussion on Political Parties, Decentralization, and Out Coming Elections Organized by CSPS UGM Jogjakarta, 3 November 2003

Agenda

SEACSN Regional Meeting Organized by Regional Coordinator of SEACSN. Chiang Mai-Thailand, 18-20 December 2003

SEACSN International Conference Organized by Regional Coordinator of SEACSN in cooperation with SIDA-Swedida Penang Malaysia, 12-15 January 2004

